

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno memerintahkan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)¹ untuk membubarkan diri dengan dalih partai tersebut tidak mampu membuktikan ketidakterlibatannya dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia-Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI-Permesta).² Melalui pimpinan Masyumi, ketika itu dijabat oleh Prawoto Mangkusasmito, Masyumi mendapat surat yang mengharuskan Masyumi dibubarkan dalam waktu satu bulan dengan alasan keterlibatan sejumlah tokoh Masyumi dalam pemberontakan PRRI-Permesta. Tindakan Presiden Soekarno merupakan pelaksanaan atas dikeluarkannya Penetapan Presiden (Penpres) No.7/1959 yang mengatur kehidupan dan pembubaran partai. Penpres itu memberi hak kepada Presiden untuk menindak partai-partai yang anggaran dasarnya bertentangan dengan dasar negara atau pimpinannya yang sedang terlibat dalam pemberontakan.³ Akan tetapi, sebelumnya Masyumi telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menganggap PRRI sebagai tindakan yang inkonstitusional.⁴ Masyumi juga menjelaskan keterlibatan tiga tokoh Masyumi, yaitu Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, serta Burhanuddin Harahap mengatasnamakan pribadi bukan partainya.⁵

¹ Majelis Syuro Muslimin Indonesia dibentuk tanggal 7 dan 8 November 1945 sebagai hasil kesepakatan dalam Mukhtamar Islam Indonesia di Yogyakarta. Mukhtamar tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh berbagai organisasi Islam dari masa sebelum perang serta masa pendudukan Jepang. Masyumi dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam. Lihat dalam Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta, 2000), hlm. 51.

² Deliar, Noer. *op. cit.*, hlm. 393.

³ Dr. Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya* (Jakarta: 1999), hlm. 51-52. Dalam penpres No.7/1959 menetapkan bahwa suatu partai dapat diakui dengan syarat: "dalam anggaran dasar organisasi dicantumkan dengan tegas bahwa organisasi itu menerima dan mempertahankan UUD Negara RI yang memuat dasar-dasar negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan rakyat, Peri Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial, dan bertujuan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia serta berdasarkan program kerjanya masing-masing atas manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959, yang telah dinyatakan menjadi haluan Negara." Noer, *op. cit.*, hlm. 410-412.

⁴ S. U. Bajasut (peny.). *Alam Fikiran dan Djejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito*, (Surabaya, 1972), hlm. 70-71.

⁵ Masyumi memutuskan untuk melepaskan ketiga tokoh yang terlibat dalam PRRI dalam suatu rapat tanggal 8 September 1959. Keputusan ini diambil untuk mengatasi kemungkinan

Jika tidak membubarkan diri dalam satu bulan, Masyumi akan dianggap sebagai parta terlarang. Pada 13 September 1960, kurang dari satu bulan dari batas waktu yang diberikan oleh pemerintah, Masyumi menyatakan membubarkan diri. Hal ini dilakukan apabila Masyumi dianggap sebagai partai terlarang, dampak negatif yang ditimbulkan bisa lebih buruk, seperti harta benda partai, aset, dan dokumen Masyumi akan disita. Pada proses selanjutnya, Masyumi menuntut pembubaran atas partainya diselesaikan di meja peradilan.⁶

Setelah pembubaran Masyumi, partai Islam masih memiliki peranan dalam pemerintahan meskipun garis yang diambil berbeda dengan masa sebelumnya. NU, Perti, dan PSII merupakan partai-partai yang memiliki peranan pada masa Demokrasi Terpimpin. Ketiga partai tersebut berhasil bertahan dalam masa Demokrasi Terpimpin karena mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan Demokrasi Terpimpin seperti dikehendaki oleh Presiden Soekarno. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin, partai Islam kehilangan identitasnya karena politik bersifat akomodatif dengan pihak penguasa.⁷

Di parlemen, kalangan Islam kehilangan suara yang cukup banyak jika dibandingkan dengan masa Demokrasi Liberal.⁸ Begitu juga di kabinet Djuanda (1957-1959), meskipun NU mendapatkan empat kursi (PNI hanya mendapatkan tiga kursi), jumlah yang relatif besar itu tidak pernah memengaruhi keputusan kabinet. Hal ini juga disebabkan campur tangan aktif Presiden Soekarno dalam pemerintahan.⁹ Partai-partai Islam lebih memilih untuk melaksanakan politik akomodatif dibanding “idealisme martir”¹⁰ yang akan berujung pada pembubaran partainya, seperti yang dianut oleh Masyumi. Bentuk politik akomodatif partai-

pembubaran Masyumi, lihat dalam Noer, *op. cit.*, hlm. 400. Mengenai pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Masyumi No. 1130/Sek-PP/I/M. VIII/1958 lihat dalam .S. U. Bajasut. (peny.). *op. cit.*, hlm. 70-71.

⁶ Noer, *op. cit.*, hlm. 415-416. Upaya rehabilitasi Masyumi yang dilakukan Prawoto sebagai Ketua Masyumi sebelum dibubarkan lihat dalam S. U. Bajasut. (peny.). *op. cit.*, hlm. 161-180.

⁷ Noer, *op. cit.*, hlm., 417. Noer mendefinisikan akomodatif partai-partai Islam sebagai sikap yang memilih menyesuaikan diri dengan tuntutan Presiden Soekarno.

⁸ *Ibid.*, hlm, 429.

⁹ *Ibid.*, hlm, 427.

¹⁰ Maarif menyebut Masyumi mengambil jalan “idealisme martir” dibanding mendukung Demokrasi Terpimpin. Masyumi lebih memilih untuk menentang sistem Demokrasi Terpimpin yang hendak dilaksanakan oleh Presiden Soekarno dibandingkan membawa bencana bagi bangsa dan Negara. Lihat dalam Maarif, *op. cit.*, hlm. 54.

partai Islam pada masa Demokrasi Terpimpin dalam kerja sama Nasakom¹¹ akan dianggap revolusioner. Semakin vokal kekuatan politik atau siapa pun mendukung Nasakom, ia akan semakin dikategorikan revolusioner. Meskipun teriakan dukungan itu hanya merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kecurigaan Soekarno,¹² kebijakan yang diambil oleh partai Islam ini berlangsung hingga masa Demokrasi Terpimpin berakhir.

Kejatuhan Demokrasi Terpimpin digantikan oleh Demokrasi Pancasila pada awal pelaksanaannya masih mencari bentuk. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila menginginkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Keadaan ini membawa harapan akan keadaan politik yang jauh lebih baik di kalangan umat Islam daripada masa sebelumnya. Sesuai dengan yang diamanahkan oleh MPRS, tugas yang harus dijalankan oleh pemerintah Orde Baru dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen adalah melaksanakan rehabilitasi politik dan keamanan (polkam). Rehabilitasi polkam dilakukan agar pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat bisa segera dimulai.¹³

Pada tahun 1966, gagasan merehabilitasi Masyumi muncul di kalangan tokoh-tokoh Masyumi yang baru dibebaskan dari tahanan pada masa Demokrasi Terpimpin. Tokoh-tokoh Masyumi mengajukan rehabilitasi Masyumi sebagai alat perjuangan. Secara formal, dibentuk Panitia Rehabilitasi Masyumi yang diketuai oleh Drs. Syarif Usman dengan dukungan semua organisasi kemasyarakatan Islam yang belum berafiliasi pada partai politik.¹⁴

Pada 6 Oktober 1966, Prawoto Mangkusasmito sebagai Ketua Masyumi sewaktu dibubarkan mengirimkan surat kepada Ketua Presidium Kabinet, Jenderal Soeharto. Surat itu berisi penjelasan mengenai landasan rehabilitasi Masyumi.¹⁵

Akan tetapi, pada 21 Desember 1966, pihak ABRI dengan tegas menyatakan Masyumi disamakan dengan PKI yang bermaksud menyelewengkan

¹¹ Nasakom singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Presiden Soekarno mengakui adanya tiga golongan dalam konstelasi politik Indonesia pada masa itu.

¹² *Ibid.*, hlm. 93.

¹³ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta, 1974), hlm. 6-7.

¹⁴ Lukman Hakiem, *Perjuangan Mencari Keadilan & Persatuan: Biografi DR. Anwar Harjono, S. H.*, (Jakarta, 1993), hlm. 218.

¹⁵ S. U. Bajasut, (peny). *op. cit.*, hlm. 186-188.

Pancasila dan UUD 1945.¹⁶ Prawoto mencoba meluruskan pandangan yang menyamakan Masyumi dengan PKI yang bermaksud menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945. Prawoto beranggapan justru perintah pembubaran Masyumi yang telah menyelewengkan UUD 1945. Oleh karena itu, Masyumi menggugat Soekarno di pengadilan agar menyatakan Keppres No.200/1960 mengenai pembubaran Masyumi tidak sah secara hukum.¹⁷

Beberapa lobi tingkat tinggi digalang untuk mewujudkan keinginan itu, tetapi nyatanya keinginan itu sulit terwujud.¹⁸ Jenderal Soeharto dalam surat resminya menanggapi surat Prawoto menyatakan pihak ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi Masyumi dengan alasan yuridis, ketatanegaran, dan psikologis yang telah membawa ABRI pada satu pendirian tidak dapat menerima rehabilitasi Masyumi.¹⁹

Pada 7 April 1967, didirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang diidealisasikan sebagai kelanjutan Masyumi.²⁰ Akan tetapi, pada 5 Februari 1968 Presiden Soeharto secara tegas memberitahukan tidak seorang pun bekas tokoh Masyumi diizinkan untuk memimpin atau mengambil peranan dalam Parmusi.²¹

Harapan untuk kembali mengambil peranan oleh kalangan Islam yang dianggap pernah melakukan upaya pemberontakan kandas di tengah jalan. Pemerintah Orde Baru melakukan upaya depolitisasi terhadap kalangan Islam yang mayoritas adalah tokoh-tokoh Masyumi.

Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi polkam, Orde Baru di bawah Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang populer dengan sebutan pendekatan keamanan (*security approach*).²² Pelaksanaan politik pemerintahan yang baru itu pada akhirnya merupakan proses depolitisasi²³ terhadap umat Islam.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 189.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 210-211.

¹⁸ Thohir Luth, *op. cit.*, hlm. 54.

¹⁹ S. U. Bajasut, (*peny*), *op. cit.*, hlm. 232.

²⁰ B. J. Boland, *Pergumulan Islam Indonesia* (Jakarta, 1985), hlm., 159.

²¹ Abdul Munir Mul Khan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat 1965-1987: Dalam Perspektif Sosiologis* (Jakarta, 1987), hlm. 114. Penolakan atas formasi pimpinan Parmusi yang terdiri dari orang-orang ex-Masyumi oleh Soeharto. Posisi tawar Parmusi sangat lemah terlihat dalam pleno ke-5 Parmusi tetap mendapatkan “tekanan” dari pemerintah mengenai pimpinan dalam Parmusi lihat juga dalam S. U. Bajasut, (*peny*), *op. cit.*, hlm. 247-266.

²² Anhar Gonggong dan Musa Asy'arie, *ed. 60 Tahun Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*, (Jakarta, 2005), hlm. 144.

²³ Depolitisasi merupakan usaha untuk menjauhkan umat Islam dari peranan-peranan di bidang politik.

Sebagai sebuah alternatif bagi umat Islam atas usaha rehabilitasi Masyumi yang mengalami jalan buntu, tokoh-tokoh Masyumi mendirikan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII). Lembaga ini didirikan pada 26 Februari 1967 sebagai sebuah kesepakatan yang dihasilkan oleh beberapa tokoh di Jakarta pada pertemuan halalbihalal tahun itu. Pada pertemuan itu dibahas tentang perkembangan dakwah Islam, terutama yang dapat diamati pada masa transisi politik setelah terjadi pemberontakan G. 30 S.²⁴ Forum ini dihadiri oleh M. Natsir, H. M. Rasyidi, K. H. Taufiqurrahman, Haji Mansur Daud Datuk Palimo Kayo, dan Haji Nawawi Duski. Menurut pengamatan mereka, perkembangan agama Islam cukup memprihatinkan. Dakwah Islam yang dilakukan, baik perorangan maupun lembaga organisasi keagamaan, dinilai berjalan tidak teratur, kurang koordinasi, dan memakai pendekatan cara-cara lama. Dengan melihat kenyataan demikian, didirikanlah lembaga yang berbentuk yayasan yang tujuan umumnya untuk menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah Islam di Indonesia.²⁵

DDII didirikan untuk meningkatkan kualitas serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga dakwah yang telah bekerja selama ini. Peningkatan yang dilakukan di bidang mutu dakwah mencakup persiapan organisasi, metode, bahan-bahan perlengkapan, riset, komunikasi, administrasi, dana, dan lain-lain. Tolak ukur keberhasilan dakwah tidak hanya ilmu yang bersifat ilmiah tetapi juga bergantung pada kepribadian *da'i*²⁶ dan ini bergantung pada persiapan mentalnya.

²⁴ Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno tidak dapat mengendalikan konflik yang semakin menajam antara PKI dan TNI AD. Konflik antara dua kalangan tersebut berujung pada peristiwa yang disebut Gerakan 30 September. Peristiwa ini dimulai dengan bergeraknya tiga pasukan (Bima Sakti, Pasopati, Gatotkaca) dari basis mereka di Lubang Buaya menuju pusat kota Jakarta. Pasukan-pasukan tersebut berbagi tugas untuk menduduki objek-objek vital serta menuju rumah orang-orang yang menjadi sasaran gerakannya. Pada pukul 07.00 melalui siaran RRI diketahui bahwa pasukan bergerak pada dini hari merupakan pasukan G 30 S yang dipimpin oleh Kolonel Untung Komandan Batlyon I /Kawal Kehormatan Resimen Tjakrabirawa. Melalui siaran radio tersebut diberitahukan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta yang dilakukan oleh Dewan Djenderal (DD). Akan tetapi pada pukul 19.00 WIB Jumat 1 Oktober 1965 Mayor Jenderal Soeharto sebagai Pangkostrad melalui siaran di RRI bahwa telah terjadi kontrarevolusioner yang menculik enam orang pimpinan TNI AD. Kemudian, rakyat bereaksi mengutuk tindakan dalam G 30 S serta memberikan dukungan terhadap yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto. Peristiwa G 30 S dikaitkan dengan peranan PKI untuk melakukan perebutan kekuasaan serta menimbulkan krisis kepemimpinan negara Lihat dalam *Perjalanan Bangsa... op. cit.*, hlm. 118-129.

²⁵ Luth, *op. cit.*, hlm. 55-56.

²⁶ *Da'i* merupakan orang yang kerjanya berdakwah; pendakwah. Lihat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2003,231). Biasanya orang yang dikatakan sebagai *da'i* memiliki keahlian agama, seperti Hadist, Tafsir, Fiqh, atau yang lainnya. Seseorang dikatakan sebagai *da'i* juga ketika ia mengajarkan ilmunya tersebut kepada orang lain.

Da'i diharapkan tidak hanya mampu berdakwah di kalangan umat Islam, tetapi juga dapat berdakwah dalam kalangan yang lebih luas.²⁷

Natsir yang menjabat sebagai Ketua DDII mengatakan pendirian lembaga ini sebagai “lari”²⁸ ke dakwah. Menurutnya, politik dan dakwah itu tidak terpisah. Jadi, dulu berdakwah lewat politik dan sekarang berpolitik melalui jalur dakwah.²⁹ Implementasi dari slogan Natsir yang terkenal ini menjadi arah gerakan DDII selanjutnya, terutama mengenai sikapnya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah penerbitan buku-buku PMP untuk tingkat SD, SLP, dan SLA.

Pada Oktober 1980, diterbitkan buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tingkat SD, SLP, dan SLA. Penerbitan buku PMP merupakan salah satu pelaksanaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 pada 22 Maret 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).³⁰ Dalam ketetapan tersebut disebutkan bahwa P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia.³¹

Buku tersebut menuai protes keras dari kalangan umat Islam. Buku PMP menuai protes dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dalam sidang pleno DPR tanggal 13 Juni 1981 dengan kata-kata yang cukup tegas mengatakan bahwa buku-buku PMP mengandung hal-hal yang merusak akidah dan syariat agama.³² Buku PMP ditakutkan akan merusak akidah anak-anak.³³ Akan tetapi, protes keras dari FPP di DPR itu tidak mendapatkan sambutan dari pemerintah sampai enam bulan kemudian, padahal penerbitan buku ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Setelah enam bulan FPP mengajukan keberatannya dalam sidang pleno DPR, Natsir menulis sebuah artikel yang berjudul “Buku PMP yang Meresahkan:

²⁷ *Loc. cit.*, hlm. 15.

²⁸ Lari ke dakwah merupakan upaya yang dilakukan oleh M. Natsir setelah upaya yang dilakukan untuk kembali ke ranah politik mengalami kegagalan. Upaya ini dilakukan setelah Orde Baru menolak upaya rehabilitasi Masyumi tahun 1966.

²⁹ Natsir, *op. cit.*, hlm. 22.

³⁰ “Buku PMP yang Meresahkan Usaha Pendangkalan Agama yang Mendasar.” *Serial Media Dakwah*, no. 90 (Shafar 1402 H/Desember 1981), hlm., 32-33.

³¹ *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1978. Departemen Penerangan R. I. Hlm.*, 49-59.

³² *Loc. cit.*,

³³ “Buku PMP Tidak Membahas Segi Agama.” *Kompas*, 23 Februari 1982.

Upaya Pendangkalan Agama yang Mendasar” dalam majalah *Serial Media Dakwah*. Artikel tersebut merupakan dukungan terhadap penolakan akan buku-buku PMP yang dikemukakan oleh FPP di DPR. Dalam artikel tersebut, Natsir memaparkan beberapa bagian dari buku PMP yang dianggap sebagai mata rantai dari usaha pendangkalan agama.³⁴

Setelah protes yang diajukan oleh FPP dan M. Natsir, Januari 1982 Presiden Soeharto memerintahkan BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman dan Pengamalan Pancasila) untuk melakukan perbaikan terhadap buku-buku PMP tersebut. Perbaikan buku-buku tersebut tetap berdasarkan Tap MPR No.II/tahun 1978 mengenai P4.³⁵

Berbeda dengan FPP, Fraksi Karya Pembangunan (FKP) menilai buku-buku tersebut tidak dapat ditinjau dari segi agama. Hal ini dianggap karena buku PMP bukan merupakan buku agama, tetapi buku PMP harus ditinjau dari P4.³⁶ FKP menganggap penerbitan buku PMP tidak meresahkan masyarakat.³⁷

DDII mendukung pendapat yang disampaikan oleh FPP. DDII beranggapan buku PMP mengandung unsur-unsur pendangkalan agama, menyamakan semua agama, dan unsur-unsur yang mempertentangkan Pancasila dengan agama.³⁸

Senada dengan pernyataan FPP dan DDII, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama mengadakan pengkajian mengenai “*Perspektif Golongan Islam Terhadap Buku-buku Teks PMP.*” Hasil penelitian tersebut secara umum memandang buku PMP banyak mengandung ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran yang perlu bagi anak didik. Hal ini dipandang karena di dalamnya didapati berbagai uraian mengenai kewarganegaraan dan pengetahuan lainnya yang diperlukan oleh pelajar. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dianggap merugikan, keliru, bahkan menyesatkan jika dipandang dari perspektif Islam.³⁹

³⁴ M. Natsir, Buku PMP yang Meresahkan: Upaya Pendangkalan Agama yang Mendasar.” *Serial Media Dakwah*, no. 90 Shafar 1402 H/Desember 1981.

³⁵ *Kompas*, 22 Januari 1982.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ “Jangan Mengagama-Agamakan Pancasila dan Sebaiknya Jangan Mem-Pancasilakan Agama.” *Serial Media Dakwah*, no.93 (Jumadil Awal 1402 H/Maret 1982 M). hlm. 4-16.

³⁹ M. Yunan Nasution, “Persepsi Golongan Islam Terhadap Buku-buku Teks PMP,” *Serial Media Dakwah*, no. 90 (Shafar1402 H/Desember 1981).

Pada 23 Agustus 1982, tokoh-tokoh Islam menemui pimpinan DPR/MPR RI untuk menyampaikan tuntutan terhadap perlunya peninjauan secara menyeluruh terhadap buku PMP.⁴⁰ Tokoh-tokoh tersebut meminta agar buku-buku PMP segera direvisi. Revisi yang dilakukan pun harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya redaksional saja.

Pada 31 Agustus 1982, setelah bekerja selama kurang lebih delapan bulan untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai bagian dari buku-buku PMP yang perlu diperbaiki, tim perbaikan menghadap Presiden Soeharto untuk melaporkan kinerjanya. Presiden Soeharto menyetujui penyempurnaan yang akan dilakukan tim tersebut dan menginstruksikan untuk segera mencetaknya.⁴¹

Penelitian dan kajian yang lebih khusus mengenai penerbitan buku PMP belum penulis temukan sampai saat ini dalam buku Dr.Thohir Luth (1999) *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*.⁴² Penelitian ini lebih berfokus pada peranan Mohammad Natsir sebagai seorang ulama dan negarawan. Buku ini tidak menyinggung kritik Natsir yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DDII terhadap penerbitan buku PMP, tetapi penulis mengungkapkan peranan seorang Natsir saja. Selain itu, penulis tidak menjabarkan secara jelas mengenai penyelesaian terhadap protes yang dilayangkan oleh DDII kepada pemerintah. Oleh karena itulah, penulis mencoba meneliti lebih dalam mengenai pandangan DDII terhadap penerbitan buku PMP.

Selain itu, penulis juga menemukan tesis sejarah yang berkaitan dengan respon umat Islam terhadap kebijakan Orde Baru. Tiar Anwar Bahtiar (2008) *Respon Intelektual Persatuan Islam Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru*.⁴³ Penelitian ini lebih difokuskan pada respon kalangan Persatuan Islam (Persis) terhadap depolitisasi umat Islam yang diberlakukan pada masa Orde Baru. Bahtiar membagi tiga respon kalangan Persis terhadap kebijakan Orde Baru. *Pertama*, Persis memilih jalan “dakwah” sebagai aktivitas baru ketika politik dibungkam. Jalur dakwah yang dijalankan oleh anggota Persis ini nantinya akan melahirkan

⁴⁰ “Tokoh-Tokoh Islam Tuntut Buku PMP Ditinjau ke DPR.” *Serial Media Dakwah*, no.98 Syawal/Zulqoidah 1402H/September 1982.

⁴¹ *Kompas*, 1 September 1982.

⁴² Luth, Thohir. 1999. *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press.

⁴³ Bahtiar, Tiar Anwar. 2008. *Respon Intelektual Persatuan Islam Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru*. Tesis Sejarah Universitas Indonesia.

DDII tahun 1967. M. Natsir adalah ketua DDII berlatar belakang Persis. *Kedua*, Persis memopulerkan alternatif “pembaharuan pemikiran” yang lebih berpihak pada modernisasi. *Ketiga*, Persis menekuni aktivitas swadaya masyarakat dengan menekuni LSM-LSM dalam menghindari hubungan secara langsung dengan pemerintah dan menghindari kecurigaan terhadap akan kembalinya Persis ke dalam dunia politik melalui Masyumi.

I. 2 Perumusan Masalah

Upaya pendiskreditan agama terhadap Pancasila, khususnya depolitisasi Islam, terus dilancarkan dengan diterbitkannya buku PMP bagi murid-murid SD, SLP, dan SLA. Penelitian ini berfokus pada sikap DDII terhadap penerbitan buku PMP tahun 1980-1982. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya DDII ?
2. Mengapa pemerintah menerbitkan buku PMP ?
3. Mengapa DDII menolak penerbitan buku-buku PMP ?
4. Apa yang dilakukan pemerintah terhadap penolakan yang dilakukan oleh DDII?

I. 3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan sejarah, ada batasan untuk mengkaji suatu permasalahan, yaitu batasan dari segi temporal (waktu), batasan spasial (tempat), dan tematis.

Dari segi temporal, penelitian ini membahas periode 1980—1982. Penelitian ini difokuskan sejak tahun 1980 karena pada tahun itu pemerintah mengeluarkan kebijakan penerbitan buku PMP bagi siswa-siswa SD, SLP, dan SLA. Penerbitan buku PMP ini menimbulkan keresahan di tubuh umat Islam dan menimbulkan reaksi keras dari DDII. Hal tersebut dianggap merusak akidah anak-anak muslim di Indonesia. Penelitian ini dibatasi hingga tahun 1982. Alasannya, pada tahun 1982, pemerintah melaksanakan revisi terhadap buku-buku PMP.

Dari segi spasial, fokus penelitian ini ditujukan pada Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia sebagai salah satu wadah umat Islam. DDII merupakan lembaga Islam yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama

yang terkait dengan umat Islam. Kemudian, dari segi tematis, penelitian ini akan membahas sikap dan pandangan DDII terhadap kebijakan pemerintah yang menerbitkan buku PMP bagi siswa-siswa SD, SLP, dan SLA.

I. 4 Tujuan Penelitian

Kajian mengenai sikap umat Islam Indonesia terhadap pemerintah merupakan kajian yang cukup menarik karena sikap kritis yang ditujukan kepada pihak penguasa. Penelitian ini akan melihat bagaimana sikap DDII sebagai lembaga yang lebih dititikberatkan pada bidang peningkatan mutu dakwah yang bereaksi keras pada kasus penerbitan buku PMP yang merusak akidah pelajar-pelajar muslim di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai sikap DDII menyikapi penerbitan buku tersebut.

I. 5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode ini diawali dengan mengumpulkan data (*heuristik*). Sumber-sumber yang terkait dengan DDII penulis dapatkan di lembaga tersebut. Akan tetapi, penulis tidak dapat mewawancarai tokoh-tokoh DDII yang bereaksi keras ketika penerbitan buku itu, seperti Mohammad Natsir dan Mohamad Roem karena tokoh-tokoh tersebut telah meninggal dunia. Oleh karena itu, penulis hanya menggunakan sumber-sumber tertulis.

Sumber-sumber yang diperoleh dalam tahap *heuristik* tersebut selanjutnya perlu melalui tahap kritik internal untuk melihat kredibilitasnya sebagai sumber sejarah serta relevansinya dengan penelitian ini. Pada tahap ini, penulis mengolaborasi dan membandingkan sumber yang satu dengan sumber lainnya.

Tahap ketiga metode sejarah adalah interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap fakta yang ditemukan dalam sumber-sumber yang didapat oleh penulis. Interpretasi ini dilakukan dengan menganalisis data-data yang telah melewati proses kritik.

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Fakta-fakta sejarah yang ditemukan diseleksi, disusun, diberi tekanan, dan ditempatkan dalam suatu urutan kronologis dan sistematis. Penulis menyeleksi

dan memberikan tekanan pada fakta-fakta yang bisa menggambarkan pandangan DDII terhadap penerbitan buku PMP.

Penulis juga membandingkan sikap DDII bersama organisasi Islam lainnya terhadap penerbitan buku PMP agar tergambar dinamika sosial dan politik ketika itu.

I. 6 Sumber Sejarah

Sumber-sumber yang penting dan terkait dengan tulisan ini penulis klasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penulis dapatkan melalui koran dan majalah sezaman dengan peristiwa tersebut. Sumber mengenai sikap DDII terhadap penerbitan buku PMP banyak penulis dapatkan dari *Serial Media Dakwah* yang merupakan majalah yang diterbitkan oleh DDII. Selain *Serial Media Dakwah*, penulis juga mendapatkan sumber dari koran *Kompas* dan *Sinar Harapan*. Sumber primer juga penulis dapatkan dari tulisan tokoh Masyumi yang telah dibukukan, antara lain *Alam Fikiran dan Djedjak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito*. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari Prawoto Mangkusasmito di beberapa media cetak.

Sumber sekunder penulis dapatkan, baik dari buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis lainnya maupun dari tokoh pendiri DDII. Rusli M. Karim (1985) dalam bukunya *Dinamika Islam di Indonesia; Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*.⁴⁴ Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kebijakan Orde Baru terhadap umat Islam. Lukman Hakiem (1993) *Perjalanan Mencari Keadilan & Persatuan: Biografi DR Anwar Harjono, S. H.*⁴⁵ Buku ini merupakan biografi Anwar Harjono salah seorang tokoh yang berperan sebagai pendiri DDII dan pernah menjabat sebagai Ketua DDII. Buku ini memaparkan peranan beliau sejak zaman Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru. Lukman Hakiem & Tamsil Linrung (1997) *Menunaikan Panggilan Risalah: Dokumentasi Perjalanan 30 Tahun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*.⁴⁶ Buku ini merupakan buku

⁴⁴ M. Karim, Rusli. 1985. *Dinamika Islam di Indonesia; Suatu Tinjauan Sosial dan Politik* Yogyakarta: PT. Hanindita.

⁴⁵ Hakiem, Lukman. 1993. *Perjalanan Mencari Keadilan & Persatuan: Biografi DR. Anwar Harjono, S. H.* Jakarta: Media Da'wah.

⁴⁶ Hakiem, Lukman & Tamsil Linrung. 1997. *Menunaikan Panggilan Risalah: Dokumentasi Perjalanan 30 Tahun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*. Jakarta: PT. ABADI.

dokumentasi perjalanan DDII selama 30 tahun berdiri. Di dalam buku ini juga dipaparkan secara singkat mengenai latar belakang pembentukan DDII.

Sumber-sumber tersebut penulis peroleh antara lain dari Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Perpustakaan CSIS, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Departemen Agama, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Umum Daerah Jakarta (Perpumda), Pusat Dokumentasi Kompas, Perpustakaan Balai Pustaka, Perpustakaan Iqro' Masjid Ukhuwah Islamiyah (MUI).

I. 7 Sistematika Penulisan

Penelitian yang diberi judul Sikap Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Terhadap Penerbitan Buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) 1980-1982 ini akan ditulis dalam lima bab.

Bab I memaparkan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II menguraikan Islam masa Orde Baru

Bab III menguraikan mengenai DDII, serta visi dan misinya sebagai yayasan Islam. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai bagian dari buku PMP yang diprotes DDII

Bab IV menguraikan tanggapan pemerintah, lembaga-lembaga Islam, serta lembaga agama lainnya mengenai protes yang dilayangkan DDII atas penerbitan buku PMP.

Bab V berisi kesimpulan.